

Supriadi, S.H., M.Hum.

HUKUM KEHUTANAN HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

Penerbit



SINAR GRAFIKA

HUKUM KEHUTANAN HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Kehutanan, Hukum Kehutanan adalah kumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan hutan dan pengurusannya.

Adapun perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

(Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan)

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan. Diuraikan secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang sangat komunikatif, sehingga dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

Substansi dari buku yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, meliputi:

- Pengembangan Kehutanan di Indonesia.
- Perencanaan Kehutanan.
- Pengelolaan Hutan.
- *Illegal Logging* dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH).
- Perlindungan Hutan.
- Hutan Kota.
- Gugatan Perwakilan dan Penyelesaian Sengketa Kehutanan.
- Hukum Perkebunan dan Permasalahannya.

KEISTIMEWAAN BUKU INI

- Berisikan argumentasi secara teoretis-kritis mengenai Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan yang didukung dengan pendapat para pakar dan ide yang brillian dari penulis.
- Penyajiannya disinergikan dengan semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan.
- Disertai dengan data yang lengkap dan terbaru.

ISBN 979-007-281-3



9 789790 072817
Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan
di Indonesia

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 PERKEMBANGAN KEHUTANAN DI INDONESIA	1
A. Latar Belakang	1
B. Sumber Hukum Kehutanan di Indonesia	6
C. Pengertian, Asas, dan Tujuan Kehutanan	14
D. Status, Fungsi, dan Pengurusan Hutan	18
E. Sejarah dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan	22
BAB 2 PERENCANAAN KEHUTANAN	31
A. Lembaga Perencanaan Kehutanan	31
B. Lembaga Pemerintah dan Lembaga Dunia Bidang Kehutanan	32
C. Lembaga <i>Ekolabeling</i> dan Organisasi Internasional Pengekspor Kayu Tropis (ITTO)	34
D. Perencanaan Kehutanan	39
E. Inventarisasi Hutan	42
F. Pengukuhan Hutan dan Penatagunaan Hutan	50
G. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	105
BAB 3 PENGELOLAAN HUTAN	113
A. Latar Belakang	113

B. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	116
C. Pemanfaatan Hutan	125
D. Pemberdayaan Masyarakat Setempat, Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan	183
E. Hutan Kemasyarakatan	186
F. Prinsip, Kriteria, Indikator, Pemilihan, dan Penetapan serta Penerapan Sistem Silvikultur	195
G. Penghapusan dan Perpanjangan Izin	203
H. Industri Primer Hasil Hutan	207
I. Manajemen Hutan Lestari	228
J. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	255
BAB 4 ILLEGAL LOGGING DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)	298
A. Pengertian dan Modus <i>Illegal Logging</i>	298
B. Modus Terjadinya <i>Illegal Logging</i>	303
C. Pemberantasan <i>Illegal Logging</i> dan Penyulundupan Kayu.	309
D. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).....	337
E. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	353
F. Perizinan Kehutanan	381
BAB 5 PERLINDUNGAN HUTAN	385
A. Latar Belakang	385
B. Mencegah dan Membatasi Kerusakan Hutan oleh Perbuatan Manusia	387
C. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Mengelola Hutan Melawan Emisi	432
D. Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak, Daya-Daya Alam, dan Hama Serta Penyakit	440
E. Perlindungan Hutan dari Kebakaran	442

F. Pencegahan, Pemadaman, dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan	447
G. Pengamanan Kehutanan	450
H. Sanksi Pidana, Ganti Rugi dan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	454
I. Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Kehutanan	458
J. Pengawasan dan Penyerahan Kewenangan	463
K. Masyarakat Hukum Adat dan Peran serta Masyarakat	465
L. Peran serta Masyarakat	476
BAB 6 HUTAN KOTA	481
A. Pendahuluan	481
B. Kota Berwawasan Ekologi	485
C. Hutan Kota dan Peranannya	495
BAB 7 GUGATAN PERWAKILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN	512
A. Gugatan Perwakilan	512
B. Penyelesaian Sengketa Kehutanan	513
C. Penyidikan Kehutanan	514
D. Ketentuan Pidana	520
E. Ganti Rugi dan Sanksi Administratif	523
F. Sanksi Administratif Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan	540
BAB 8 HUKUM PERKEBUNAN	544
A. Latar Belakang	544
B. Asas, Tujuan, Fungsi, dan Perencanaan Perkebunan	546
C. Penggunaan Tanah untuk dan Usaha Pengelolaan Usaha Perkebunan	549

D. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	562
E. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan	564
F. Pembinaan, Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana Perkebunan	567
 DAFTAR PUSTAKA	 573
GLOSARIUM	579
LAMPIRAN	589
PROFIL PENULIS	705